

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang sangat wajib untuk umat muslim laksanakan. Zakat adalah syiar dan identitas dalam masyarakat islam, selain sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT zakat juga mengandung aspek sosial (Arif, 2006:5). Ayat - ayat Al-quran mengulang - ulang kata zakat secara ma'rifah sebanyak tiga puluh kali, delapan disebutkan dalam surat - surat makkiyah dan dua puluh dua diantaranya disebutkan dalam surat - surat madaniyah. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya untuk membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat. Seseorang yang telah mengeluarkan zakat dapat dikatakan bahwa ia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Membersihkan diri dari sifat bakhil dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada pada hartanya itu. Undang – undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Zakat sendiri harus dikelola dan didistribusikan secara merata sesuai dengan ketentuan syariah melalui lembaga amil zakat.

Zakat memiliki enam prinsip yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (Arif, 2006:29), dimana prinsip-prinsip tersebut terdiri atas sebagai berikut:

1. Prinsip tahunan, yang dimaksudkan dari prinsip ini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki dalam satu tahun berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting yakni nilai akhir dari aset tersebut pada saat akhir masa haul.
2. Prinsip indepedensi tahun keuangan, yang dimaksud disini adalah setiap periode produktivitas aset pada satu haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya. Sebab oleh karena itu kewajiban zakat tidak bisa diestimasi atau dipukul rata nilai yang dizakatkan untuk tiap tahunnya.
3. Prinsip standar mencapai nisab, yang dimaksud nisab disini adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib pajak. Dengan kata lain hanya aset surplus yang menjadi objek zakat.
4. Prinsip Aset standar aset produktif, yang berarti hanya sumber zakat yang dapat berkembang, baik secara rill maupun tidak, baik harta tersebut habis dalam satu haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah.
5. Prinsip laba bersih, aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Prinsip ini berarti juga bahwa hutang-hutang yang dimiliki harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat.
6. Prinsip Etik dan Kewajaran, Zakat tidak diminta secara semena-mena atau dipaksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah karena akan memberatkan yang bersangkutan.

Amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 Memberikan Definisi – definisi yang terdapat dalam keterkaitannya dengan lembaga organisasi pengelola zakat;

Pertama, Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Kedua, Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Ketiga, Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Keempat, Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Kelima, Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi ( ditentukan) maupun tidak dibatasi. Keenam, Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, mustahiq sendiri terdiri atas: Fakir, Miskin, Riqab, Ghorim (orang yang terlilit hutang), Muallaf, Fisabilillah, Ibnu sabil (orang dalam perjalanan), Amil. Ketujuh, *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan zakat). Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)

Pengelolaan zakat di indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses islami yang terjadi pada abad ketujuh masehi. Dibawah pemerintahan B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat Undang-undang, yaitu UU No.38 tahun 1999. Lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang lagi sebagai masalah intern umat muslim, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Pengelolaan zakat dilakukan oleh negara dan bersifat memaksa bagi umat islam yang hartanya telah mencapai batas nisab. Namun di

Indonesia, sejak kemerdekaan zakat dikelola tanpa keterlibatan pemerintah secara penuh. Pengelolaan zakat dijalankan secara sukarela oleh individu masyarakat yang dipelopori oleh dua lembaga keagamaan yaitu masjid dan pesantren. Model pengelolaan ini terus berjalan pada awal kemerdekaan, orde baru dan era reformasi pada saat ini baik oleh institusi formal yang telah memiliki badan hukum sebagai pengelola zakat atau tidak formal tanpa badan hukum, bahkan juga yang bersifat individu yang berbasis kepercayaan dari masyarakat.

UU Nomor 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa hubungan antarbadan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinatif, konsultatif, informatif. Organisasi yang berhak untuk melakukan pengelolaan atas zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi yang berkembang atas keyakinan masyarakat disebut sebagai lembaga amil zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang dikenal dengan badan amil zakat (BAZ) atau yang lebih dikenal dengan istilah badan amil zakat nasional (BAZNAS). UU baru yakni pasal 29 bahwa hubungan antarbadan dan lembaga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan yaitu melakukan pengelolaan dana zakat dan sumber-sumber dana sosial lainnya untuk keperluan umat. Potensi zakat sendiri di Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai dua ratus tujuh belas triliun dan pada tahun 2015 sendiri telah menyentuh angka dua ratus delapan puluh enam triliun. Dengan potensi dana sebesar itu apakah untuk merealisasikan menjadi sebuah kenyataan seiring dengan

perencanaan yang strategis dan apakah amanah dalam melakukan pengawasan dananya.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya penyelewengan atas penggunaan dana zakat seperti kasus yang dimuat pada [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), dimana kepala kejaksaan negeri Jantho, Rustam mengungkapkan mantan Kepala Baitul Mal Aceh Besar yang kini menjabat Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh, Armiadi Musa ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011. Untuk mengatasi hal tersebut dalam undang-undang RI no 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan terkait pengumpulan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya telah melalui proses audit kepada BAZNAS.

Sebuah organisasi pengelola zakat harusnya bertindak secara profesional, dimaknai profesional yakni bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen organisasi yang baik. Hal tersebut wajib dilakukan agar tidak terjadi sebuah kesalahan seperti yang dimuat [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dimana Ibu Walikota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pembekuan terhadap BAZ di Kota Surabaya dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang dirasa ada kejanggalan, dengan bukti bahwa hampir 50% dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan pengurus. Padahal manajemen terkait kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam penghimpunan dan penyaluran di organisasi telah tersusun secara baik. Transparansi dalam sebuah pengelolaan dana umat dalam kasus ini

terkait zakat akan menumbuhkan kepercayaan dari para *muzakki* untuk membayar zakat dan meningkatkan motivasi *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya.

YDSF merupakan salah satu lembaga amil zakat di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 maret tahun 1987 atau yang lebih dikenal dengan Yayasan Dana Sosial Al - Falah yang telah memiliki Donatur sebanyak 256.000 dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah bergabung dengan YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa yang telah berkontribusi untuk membangun negeri dan telah dirasakan manfaatnya oleh dua puluh lima provinsi di indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan zedekah (ZIS) terpercaya di indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa YDSF memiliki sdm yang sangat baik dan telah dalam melakukan pengelolaan terkait penerimaan dan penyaluran dana ZIS.

Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 terkait pelaporan keuangan organisasi nirlaba akan tetapi Sejak tahun 2008 IAI sebagai wadah akuntan di Indonesia telah membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 yang mengatur perihal terkait Akuntansi zakat, infaq/ sedekah, dimana ruang lingkup untuk pernyataan diatas berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Diharapkan atas dibuatnya PSAK 109 ini dapat diwujudkan keseragaman atas pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat dan dapat mengawasinya. PSAK 109 menjelaskan lebih dalam mengenai ZIS baik dari

pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan terkait masalah kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah. berdasarkan penjelasan di atas terkait YDSF sebagai lembaga pendayagunaan terkait dana zakat, infaq dan sedekah dan PSAK 109 yang mengatur terkait zakat, infaq dan sedekah timbul ketertarikan untuk mengetahui penghimpunan dana zakatnya. maka penelitian diambil judul **“Penerapan *Good Corporate Governance* pada Penghimpunan Dana Zakat di Lembaga “YDSF” Kota Surabaya”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Yayasan Dana Sosial Al - Falahtelah melakukan pencatatan, pengakuan dan pengukuran dana sesuai dengan SKM RI No 524 tahun 2016 ?
2. Apakah lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah memiliki pengawasan dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana ?
3. Apakah Sistemika Penghimpunan Dana Zakat pada Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah bergantung pada pihak lain ?
4. Apakah lembaga Yayasan Dana Sosial Al - Falah telah melakukan pengungkapan dan transparansi laporan keuangan sesuai dengan SKM RI No 524 tahun 2016 ?

### 1.3 **Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah memfokuskan terkait sistematika penghimpunan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al - Falah, adanya transparansi atas penghimpunan dana zakat dan sesuai dengan hukum islam dan PSAK No 109, dan bagaimanakah langkah yang ditempuh oleh lembaga dalam menyusun target penghimpunan dana. Sehingga timbul sebuah *Good Corporate Governancr* berdasarkan SKM RI No. 524 tahun 2016.

### 1.4 **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada manfaat kepada beberapa pihak , manfaat tersebut antara lain :

1. Kepada semua pihak baik *muzakki* maupun dari lembaga YDSF sebagai acuan untuk lebih memperhatikan terkait pengawasan penghimpunan dana zakat.
2. Bagi STIE Perbanas Surabaya dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
3. Memberikan Pengetahuan bagi masyarakat umum bahwa sebenarnya pengelolaan atas sistematika penghimpunan dana zakat telah benar-benar dilakukan sesuai dengan hukum syariat islam yang berlaku.
4. Tercapainya efisiensi dan efektifitas terkait sistematika penghimpunan dana zakat dan memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.



## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah yang baik, sebaiknya memiliki tahapan-tahapan dan rujukan yang digunakan dalam proses penulisan. Dimana tahapan-tahapan dan rujukan pada nantinya akan membantu penulis untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang tersusun secara baik dan tersistematis. Berikut sistematika karya tulis dalam proposal Skripsi ini :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Penjelasan atas latar belakang masalah yang merupakan dasar atas dilakukannya penelitian untuk menyusun pembahasan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, untuk kemudian menyusun sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Memberikan penjelasan atas penelitian terdahulu yang berkaitan atas penelitian ini, landasan teori yang menjadi acuan melakukan penelitian sehingga terbentuk kerangka penelitian.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Memberikan penjelasan dan penjabaran terkait rancangan penelitian, dan teknik yang akan dilakukan sebagai alat penelitian. Isi dari bab ini meliputi deskripsi latar, metode atau teknik penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Memberikan gambaran mengenai subjek penelitian, analisis data yang berkaitan dengan hasil dari wawancara dengan narasumber, beserta tanggapan peneliti atas fenomena yang terjadi.

#### BAB V PENUTUP

Menjelaskan terkait kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan yang menjawab mengenai hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang berguna bagi penelitian – penelitian yang akan datang.

